

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

Abdul Rohman¹, Agus Ismaya², Tri Lestari³

Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : abdiujangrohman@gmail.com

Abstrak

The purpose of this research is to get the evidence about effect of human resources, government accounting standards, information technology utilization, internal control, and organizational commitment on the quality of local government finance. The population in this study is the Regional Device Organization (OPD) Kota Serang with samples secretary, heads of division and staff doing financial activities. Sample were selected by purposive sampling method. Data obtained by distributing questionnaire directly to 128 responden and 82 questionnaire that can be processed. Analysis of data using multiple linear regression with SPSS (Statistics Product and Service Solution) 25.

Keywords: *Human resources, Government accounting standards, Information technology utilization, Internal control, Organizational commitment, government financial statement quality.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah di daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas memaksa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Noprial, 2017). Hal ini dijelaskan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang pemerintah daerah. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Fenomena baru di media massa berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu munculnya iklan ucapan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan. Predikat ini seolah-olah membanggakan dan harus diketahui masyarakat. Di jajaran pemerintah daerah, menyusun laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintahan sebagai penyebabnya. euforia untuk memperoleh opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan sampai Presiden. Ini semua terkait dengan target pemerintah, bahwa pada tahun 2017 opini WTP harus mencapai 60% .

Penerapan sistem akuntansi sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2017. Bentuk laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut

harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar lebih accountable dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas (PP No. 71 Tahun 2010).

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Maksyur (2017) dengan judul pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sample dan penambahan variabel. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Serang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Kota Serang adalah karena Pemerintah Kota Serang mendapatkan opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2018 berarti bahwa laporan keuangan masih wajar namun terdapat catatan yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di kota Serang. Kemudian, peneliti menambah variabel standar akuntansi pemerintah (SAP) karena pertama sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, harus paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan) sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Kedua dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kapasitas sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi pemerintah sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principal* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Haliah, 2012). Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Stewardship Theory berangkat dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. Dalam pengelolaan *Stewardship Theory* pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. *Stewardship theory* dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi antara *shareholder* dan manajemen, atau dapat pula hubungan antara top manajemen dengan para manajer di bawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (FX Anton: 2010)

Kualitas Laporan Keuangan

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Iman Mulyana 2010:96). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi 2011:143).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. (Mahmudi, 2011:271). Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (Mahmudi, 2011:103).

Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (yosefrinaldi 2013).

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern di definisikan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi 2014: 163).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komitmen Organisasi

Kreitner dan Kinicki (2010:166), mengatakan komitmen merupakan kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Schemerhorn, Hunt, Obsborn, dan Uhl Bien (2011:72), menyatakan komitmen sebagai loyalitas seorang individu pada organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dapat mengidentifikasi dirinya dalam organisasi. Komitmen keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan berkontribusi terhadap organisasinya. Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterikatan anggota dengan organisasinya (Liziana, Sutrisno 2017).

Komitmen organisasi berhubungan dengan perasaan dan keyakinan karyawan tentang organisasi tempat dia bekerja secara keseluruhan. Menurut Jennifer M. George dan Gareth R. Jones (2012:187), ada dua dimensi komitmen organisasi.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang dibuat, maka penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis alternatif untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Maksyur, 2015).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan (Yosefrinaldi, 2013).

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Maksyur (2012) dengan hasil kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Nyoman, *et.al.*, 2014)

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Indah aprihani (2105) dengan hasil Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Nyoman,

**PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG**

et.al. (2014) menemukan hasil standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Indah, 2015). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Artika, 2016).

Hasil penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Artika (2016) diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015). Hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Maksyur 2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Susilawati dan Riana, 2014).

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maksyur 2015 dengan hasil pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014) dengan hasil pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Di dalam lingkungan pemerintah daerah, pegawai atau aparat yang memiliki komitmen sangat diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan yang baik dan andal. Selain itu, lembaga pemerintah yang memiliki komitmen dalam penyajian laporan keuangannya akan selalu berupaya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta memiliki informasi yang berkualitas. Jadi jika komitmen suatu organisasi baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan handal (Maksyur 2015).

Komitmen organisasi adalah keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan berkontribusi terhadap organisasinya. Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterikatan anggota dengan organisasinya (Sutrisno, 2017). Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh komitmen organisasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maksyur 2015 dengan hasil komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widari dan Sutrisno (2017) dengan hasil komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5: Komitmen Organisasi Memperkuat Pengaruh Komitmen Organisasi pada Kualitas Laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas : subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai pengelola keuangan dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota serang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung kantor OPD kota Serang dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan baik secara manual, maupun dengan menggunakan komputer, yaitu microsoft excel dan program spss (*Statistical product and service solution*), karena dalam program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah di pahami cara pengoprasionalannya (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dan model regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Analisis Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu sumber daya manusia, SAP, teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$LK = a + b_1 \text{SDM} + b_2 \text{SAP} + b_3 \text{TI} + b_4 \text{intern} + b_5 \text{Ko} + e$$

Dimana:

- LK = kualitas laporan keuangan
- SDM = sumber daya manusia
- SAP = standar akuntansi pemerintahan
- TI = teknologi informasi
- Intern = pengendalian intern
- KO = komitmen organisasi

**PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG**

- a = Koefisien konstanta
 b_{1,2,3} = Koefisien regresi
 e = Variabel gangguan/error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini merupakan Perangkat daerah yang berada di Kota Serang. Obyek dalam penelitian ini meliputi sekretaris, kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah, OPD yang berada dikota Serang sekitar 31. Peneliti menyebar kuesioner sekitar 128 sedangkan data yang kembali setelah penelitian sekitar 82 dari 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda. Model ini di gunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2016: 97). Berikut hasil analisis regresi berganda yang dapat dilihat pada hasil uji t (t-test):

**Tabel
Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1,078	2,736		0,394	0,695
	SDM	0,175	0,075	0,170	2,333	0,022
	SAP	0,303	0,064	0,412	4,707	0,000
	TI	0,222	0,082	0,225	2,715	0,008
	PI	0,093	0,022	0,247	3,444	0,001
	KO	0,161	0,069	0,145	2,338	0,022

a Dependent Variable: KLKPD

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Kriteria:

t hitung < t tabel maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

t hitung > t tabel maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Atau

Probabilitas value > derajat keyakinan (0,05) maka H₀ diterima dan h_a ditolak.

Probabilitas value < derajat keyakinan (0,05) maka H₀ ditolak dan h_a diterima.

Berdasarkan tabel 4.21 maka persamaan regresi terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 1,078 + 0,175 (X_1) + 0,303 (X_2) + 0,222 (X_3) + 0,093 (X_4) + 0,161 (X_5)$$

Uji kelayakan Model (*goodnees of Fit Model*)

Uji kelayakan model merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teoritis).

Nilai koefisiensi determinasi (R²) ditunjukkan dengan nilai *adjusted R-Square* dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel dependen dalam menerangkan variasi variabel-variabel independennya. Nilai koefisien dterminasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2016:96). Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian *goodness of fit model* penelitian ini sebagai berikut:

Tabel

**Koefisien determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,847	0,717	0,699	1,054

Predictors: (Constant), PI, SDM, KO, SAP, TI

Sumber: Hasil Pengolahan data (2020)

Nilai *R Square* adalah sebesar 0,717 atau 71,7 % variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi 5 (lima) independen (Sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan komitmen organisasi), sedangkan sisanya (100% - 71,7 % = 28,3 %) dijelaskan oleh sebab-sebab yang diluar model.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah model regresi diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Jika nilai signikansi < 0,05 maka Ha diterima dan sebaliknya. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak. Adapun hasil uji statistik F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	214,293	5	42,859	38,553	,000 ^b
	Residual	84,488	76	1,112		
	Total	298,780	81			

a. Dependent Variable: KLKPD

b. Predictors: (Constant), KO, SDM, PI, TI, SAP

Sumber: Hasil pengolahan Data SPSS (2020)

Hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa nilai F= 38,553 dengan signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dan dapat dikatakan bahwa persamaan model regresi dapat digunakan dan dilanjutkan kepengujian hipotesis.

**Tabel
Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	t hitung	t tabel	Signifikan	Keterangan
Sumber Daya Manusia	2,333	1,995	0,022	Diterima
Standar Akuntansi Pemerintahan	4,707	1,995	0,000	Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,715	1,995	0,008	Diterima
Pengendalian Itern	3,444	1,995	0,001	Diterima
Komitmen Organisasi	2,338	1,995	0,022	Diterima

Tabel diatas menunjukkan:

1. Hasil Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyebutkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar 0,022 < 0,05. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,333 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan berpengaruh signifikan, maka pernyataan H1 diterima.

2. Hasil Uji Hipotesis 2

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

Hipotesis 2 menyebutkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 4,707 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan berpengaruh signifikan, maka pernyataan H2 diterima.

3. Hasil Uji Hipotesis 3

Hipotesis 3 menyebutkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,715 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan berpengaruh signifikan, maka pernyataan H3 diterima.

4. Hasil Uji Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyebutkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 3,444 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan berpengaruh signifikan, maka pernyataan H4 diterima.

5. Hasil Uji Hipotesis 5

Hipotesis 5 menyebutkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,338 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan berpengaruh signifikan, maka pernyataan H5 diterima.

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,333 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik sumber daya manusia yang dihasilkan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena sumber daya manusia yang digunakan berkualitas atau memiliki kemampuan yang baik akibatnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh sumber daya manusia akan lebih baik kualitasnya.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013). Sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi / perusahaan (Mathis dan Jackson 2012:18). Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya manusia yang digunakan secara optimal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan SDM semakin naik bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Noprial (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Noprial (2015) yang meneliti pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi, terhadap kualitas laporan keuangan. Menyatakan hasil bahwa sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan, ini berarti apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan menjadi semakin baik pula.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 4,707 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik standar akuntansi keuangan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan karena standar akuntansi pemerintahan yang digunakan merupakan aturan yang harus diterapkan di laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memuat unsur-unsur yang telah diatur dalam standar akuntansi pemerintahan (Putriasri, 2017). Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah harus digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Ni lu nyoman, Anantawikrama, Nyoman (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh yang Ni lu nyoman, Anantawikrama, Nyoman (2014) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. menyatakan Penerapan Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hal ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng. Semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya Semakin rendah tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Buleleng akan semakin rendah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,715 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan kerana pemanfaatan teknologi dapat memudahkan pekerjaan pencatatan, pelaporan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelolah laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah

**PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG**

(OPD). Hal ini juga berarti bahwa terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yulia 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Yulia 2016 menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik salah satunya adalah dengan menghasilkan laporan keuangan yang berbasis teknologi informasi.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 3,444 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik pengendalian intern akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena pengendalian intern merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur suatu organisasi

Sistem pengendalian intern di definisikan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut (Mulyadi 2014: 163). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dimana sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan kualitas laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses dalam laporan keuangan (I Gusti, Gerianta, I Dewa : 2017). Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian intern memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Noprial (2015) dan Ni lu nyoman, Anantawikrama, Nyoman (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Noprial (2015) hasil penelitian, disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian yang dilakukan Ni lu nyoman, Anantawikrama, Nyoman (2014). Sistem pengendalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih akurat sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Hasil perhitungan pada regresi linear berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 2,338 dan t tabel sebesar 1,995. Nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel artinya terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Semakin baik komitmen organisasi semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan karena seorang karyawan harus memiliki suatu tujuan dan keinginan dalam mempertahankan pekerjaan yang didalam organisasi maka karyawan tersebut

akan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan akibatnya salah satu pekerjaannya yaitu laporan keuangan akan dikerjakan sebaik mungkin.

Komitmen sebagai loyalitas seorang individu pada organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dapat mengidentifikasi dirinya dalam organisasi (Schemerhorn, Hunt, Obsborn, dan Uhl Bien 2011:72). Komitmen keberpihakan anggota organisasi terhadap organisasinya serta terlibat aktif dan berkontribusi terhadap organisasinya. Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterikatan anggota dengan organisasinya (Liziana, Sutrisno 2017). Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya serta menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi yang tinggi dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya agar tujuan organisasi dapat tercapai (Rivaldy, Lintje, Natalia 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian Noprial (2015) komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika komitmen organisasi dalam setiap SKPD baik, maka akan mempengaruhi hasil laporan keuangan SKPD tersebut. Jika komitmen organisasi SKPD baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan yaitu Sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang dilatih dan memiliki kemampuan lebih mengetahui laporan keuangan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani peningkatan volume transaksi dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Serang, artinya semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, artinya semakin tinggi tingkat komitmen organisasi, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berikut ini beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mengganggu hasil dalam penelitian ini sebagai berikut: Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden. Keterbatasan dalam penelitian yang hanya dapat memperoleh 20 Perangkat Daerah dikota Serang dari 31 perangkatat daerah yang ada di kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasa yang dimiliki oleh peneliti ini, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah Melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup yang digunakan dengan sample yang lebih banyak lagi sehingga didapatkan hasil yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lainnya sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

**PERAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG**

- Aprihani Indah, 2015, Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Artika Yulia, 2016, Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten rokan hulu, *JOM Fekon Vol, 3 No, 1 Februari 2016*.
- Atmadja dan Herawati, 2014, Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggungjawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan, *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol.2 (No.1)*.
- Bastian Indra, 2011, Sistem Akuntansi Sektor Publik, penerbit salemba empat Jakarta.
- Fadila Ariesta, 2013, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
- Farida, 2013, Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra Kppn Medan Ii, *Tesis Megister, Universitas Sumatera Utara. Medan*.
- Ghozali Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kreitner dan Kinicki, 2010, Organizational Behavior, New York: McGraw-Hill.
- Mahmudi, 2011, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UII Press.
- Maksyur, 2015, Pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian intrn,dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *JOM FEKON, Vol 2*.
- Manimpurung, Kalangi, dan Gerungai, 2018. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 241-250, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia*
- Meyer dan Allen, 1997, Commitment in The Workplace, Theory, Research, and Application Advanced Topics in Organizational Behavior, Sage Publications, Inc.
- Mulyadi, 2014, Audit 2, Edisi ke-6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyana, 2010, Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat.
- PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan daerah.
- PP No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

PP No 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Pujanira dan Taman, Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerepan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY, *Jurnal nominal/volume VI nomor 2/ tahun 2017*.

Robert L, dan John H, 2012, Human Resource Management, alih bahasa, Salemba Empat, Jakarta. Sangadji dan Sopiah, 2010, Metodologi penelitian, Penerbit ANDI Yogyakarta.

Schermerhorn, Hunt, Osborn, dan Uhl-Bien, 2011, Organizational Behavior, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Siwambudi, Yasa, dan Badera, Komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.1 (2017): 385-416, ISSN : 2337-3067*.

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND, Bandung : Alfabeta.

Susilawati dan Riana, 2014, Standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, *Vol XI, No, 1. ISSN : 1693-4482*.

Udiyanti, Atmadja, dan Darmawan, 2014, Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (studi kasus pada SKPD kabupaten buleleng), *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI Volume 2 No: 1*

Widari dan Sutrisno, 2017, Pengaruh pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, *Vol. 5 Edisi 10, ISSN 20886969*.

Wilkinson, Joseph W, et.al. 2000. Accounting Information Systems. Fourth Edition, New York: John Wiley & Sons.

Yosefrinaldi, 2013, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (studi Empiris pada Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat).